

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kampar

Putaran waktu tanpa terasa telah mengantarkan Kabupaten Kampar pada usia yang lebih dari setengah abad, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2013 Kabupaten Kampar telah berusia 63 tahun. Dalam rentang waktu yang cukup panjang Kabupaten Kampar telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, yang tidak bisa dipungkiri, merupakan hasil dari proses pembangunan selama ini. Pembentukan Kabupaten Kampar tidak lepas dari sejarah yang cukup panjang yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat itu dimulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman Pemerintahan Jepang, zaman Kemerdekaan hingga era Otonomi Daerah.

Zaman Penjajahan Belanda

Pada zaman Penjajahan Belanda ini pembentukan Kabupaten Kampar telah mulai terlihat, namun Kabupaten Kampar masih embrio, belum ada pengelompokan biaya secara pasti yang dapat dijadikan cikal bakal berdirinya Kabupaten Kampar. Saat itu administrasi dan wilayah Pemerintahannya masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas, seperti: Pertama Desa Swapraja meliputi Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan yang merupakan suatu *Lanschappen* atau raja-raja dibawah *District Loofd* Pasir Pengaraian yang

dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut *Kontoleur*(Kewedanaan) daerah/wilayah yang termasuk residensi Riau.Ke dua,Kedemangan Bangkinang,membawahi kenegerian Batu Bersurat, Salo, Kuok, Bangkinang, Air Tiris termasuk residen Sumatera Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan Daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto, dan Teratak. Ketiga, Desa Swapraja Senapelan/Pekanbaru meliputi kewedanaan Kampar Kiri, Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan Singingi sampai kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kananmeluputi: Bunut, Pangkalan Kuras, Langgam, Serapung, dan Kualu Kampar(Residensi Riau). Begitu luasnya cikal bakal Kabupaten Kampar oleh Provinsi Sumatera Tengah pada bulan November 1948, disebabkan situasi diwaktu itu sudah genting antara Republik Indonesia dengan Belanda (Sejarah Singkat & Profil Kabupaten Kampar 2012 :

Zaman Penjajahan Jepang

Saat itu guna kepentingan militer Kabupaten Kampar dijadikan satu Kabupaten, dengan nama Riau Nishi Bunshu(Kabupaten Riau Barat) yang meliputi Kewedanaan Bangkinang dan Kewedanaan Pasir Pengaraian, dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah Proklamasi Kemerdekaan, maka kembali Bangkinang ke status semula, yakni Kabupaten Lima Puluh Koto, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian administrasi Pemerintahan berturut-turut seperti : CU(kecamatan), GUN(Kewedanaan), BUN(Kabupaten), Kedemangan Bangkinang dimasukkan kedalam Pekanbaru, BUN(Kabupaten) Pekanbaru (Sejarah singkat & Profil Kabupaten Kampar 2012 : 2)

Zaman Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat Kewedanaan Bangkinang dan pemuka pemuka masyarakat Kewedanaan Bangkinang kepada Pemerintah Keresidenan Riau dan Sumatera Barat agar Kewedanaan Bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Koto Keresidenan Sumatera Barat dan terhitung mulai 1 Januari 1946 Kewedanaan Bangkinang kembali masuk Kabupaten Lima Puluh Koto Keresidenan Sumatera, dan Kepala wilayah ditukar dengan sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati. Untuk mempersiapkan pembentukan Pemerintah Provinsi dan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri maka Komesariat Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi menetapkan peraturan sementara daerah-daerah Kewedanaan dan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Kabupaten Kampar dalam Provinsi Sumatera Tengah, dengan pembagian 11 (sebelas) Kabupaten di Sumatera Tengah yakni :

1. Kabupaten Singgalang Pasaman dengan Ibukota Bukit Tinggi.
2. Kabupaten Sinamar dengan Ibukota Payakumbuh
3. Kabupaten Talang dengan Ibukota Solok.
4. Kabupaten Samudera dengan Ibukota Pariaman.
5. Kabupaten Kampar dengan Ibukota Pekanbaru kecuali Kecamatan Singingi, Pasir Pengaraian, dan Kecamatan Langgam.
6. Kabupaten Kerinci dengan Ibukota Sei Penuh.
7. Kabupaten Indragiri dengan Ibukota Rengat.

8. Kabupaten Bengkalis dengan Ibukota Bengkalis. Meliputi Daerah Kewedanaan Bengkalis, Bagan Siapi-siapi, Selat Panjang, Pelalawan kecuali Kewedanaan Langgam dan Kewedanaan Siak.
9. Kabupaten Kepulauan Riau dengan Ibukota Tanjung Pinang.
10. Kabupaten Merangin dengan Ibukota Muara Tebo.
11. Kabupaten Batang Hari dengan Ibukota Jambi.

Berdasarkan pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah tersebut diketahui bahwa tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan wilayah Kabupaten Kampar. Sementara tanggal 1 Januari 1950 adalah tanggal ditunjuknya DT.Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar Pertama, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan Pemerintahan, karena adanya Kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.

Tanggal 6 Februari 1950 adalah terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai dengan Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 3/DC/STG/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Mulai tanggal 6 Februari tersebut Kabupaten Kampar resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, rakyat/masyarakat yang mendiami wilayah dan Pemerintah yang sah dan kemudian dilakukan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No.3/DC/STG/50 tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kampar Tingkat II Kampar No.02 Tahun 1999 tentang hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, dan disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Riau No.KTPS.60/II/1999 tanggal 4 Februari 1999 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar tahun 1999 No.01 tanggal 5 Februari 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) tanggal 4 Oktober 1999 Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten tersebut sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Wilayah I dan Pembantu Wilayah II, Kabupaten tersebut memperingati hari jadinya setiap tanggal 6 Februari (Sejarah singkat & Profil Kabupaten Kampar 2012 : 2-4)

Sejak terbentuknya Kabupaten Kampar sampai dengan diperingatinya hari jadi Kabupaten Kampar ke-63 tahun 2013 yang telah digelar pada Rabu 6 Februari 2013, pejabat yang pernah menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Kampar adalah

1. Datuk Wan Abdul Rahman (1 Januari 1950-1 Oktober 1954)
2. Ali Loeis (April 1954- Maret 1956)
3. A. Moein Datuk Rangkayo Maharajo (Maret 1956-Maret 1958)
4. Datuk Abdul Rahman (1959-1959)

5. Tengkoeh Moehammad (21 Januari 1965-17 Mei 1967)
6. Datuk Haroensyah (21 Januari 1960- 11 Februari 1965)
7. Raden. Soebrantas Siswanto (18 Mei 1965- 7 September 1978)
8. Abdul Makahamid, SH (7 September 1978-7 Maret 1979)
9. Sartono Hadi Sumarto (14 Februari 1979- 28 Mei 1984)
10. Syarifuddin (28 Mei 1984- 3 Oktober 1985)
11. H Imam Munandar (1985-1986)
12. H Azaly Djohan, SH (April 1996-Desember 1996)
13. Drs. Beng Sabli (1996-2001)
14. Drs. H Syawir Hamid (Maret 2001-Nopember 2001)
15. H Jefry Noer dan Wakilnya H A Zakir SH,MM (23 Nopember 2001-2006)
16. H. M. Rusli Zainal SE, Plt Bupati Kampar (25 Maret 2004-29 Juli 2005)
17. Drs. Jefry Noer dan wakilnya H A Zakir SH,MM(29 Juli -23 Nopember 2006)
18. Drs. Marjohan Yusuf Plt Kampar(24 Nopember 2006-11 Desember 2006)
19. Drs. H Burhanuddin Husin dan Wakilnya Teguh Suhono SP(2006-2011).
20. H. Jefry Noer dan Wakilnya Ibrahim Ali (2011-2015) (Sejarah singkat & Profil Kabupaten Kampar 2012 : 5).
- 21.

B. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

1. VISI

Seluruh komponen Kabupaten Kampar telah menetapkan visi Kabupaten yang menentukan tujuan pembangunan, yaitu untuk menjadikan

“KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA, DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2025 “

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah :

Seluruh komponen Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menjadikan masyarakat yang berbudaya, dimana segala perilaku seluruh komponen masyarakat haruslah berlandaskan pemikiran logis yang berakal budi, dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang dianut dan berlaku dalam masyarakat Kabupaten Kampar

Seluruh komponen Kabupaten Kampar memiliki kesungguhan hati untuk menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna menjadikan dirinya pesaing tangguh menghadapi persaingan global dan terpenuhinya kebutuhan manusia yang layak serta diperlukan secara adil.

Seluruh komponen Kabupaten Kampar bertekad untuk menjadikan masyarakat yang agamis dimana dalam segala aspek kehidupan yang dijalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan, dengan harapan Kabupaten Kampar dapat menjadi Serambi Mekkah di Provinsi Riau.

(Sejarah singkat & Profil Kabupaten Kampar 2012 : 10)

2. MISI

Untuk merealisasikan visi tersebut, ditetapkan lima pilar pembangunan, misi Kabupaten Kampar sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatkan Ahlak dan Moral.

Untuk mewujudkan pilar pertama ini adalah:

- a. Membangun masyarakat agamis/beriman.
- b. Mengembangkan investasi pariwisata dan kelestarian cagar budaya
- c. Menghargai kesetaraan gender
- d. Menumbuhkembangkan kesadaran hukum
- e. Mengembangkan budaya anti-korupsi
- f. Memberantas penyakit masyarakat
- g. Mengoptimalkan disiplin pegawai negeri sipil

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

- a. Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pendidikan unggul terpadu
- b. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam Pembangunan Daerah
- c. Menumbuhkembangkan peran pemuda dan prestasi olahraga.
- d. Optimalisasi perlindungan dan kesejahteraan sosial.
- e. Menumbuhkembangkan penggunaan Iptek dalam pembangunan daerah

3. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

- a. Pertumbuhan ekonomi daerah dan sumber-sumber PAD

- b. Menumbuhkembangkan UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro
 - c. Menurunkan jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
 - d. PENCEPATAN pembangunan perikanan air tawar
 - e. PENCEPATAN pembangunan pertanian dan ketahanan pangan
 - f. Optimalisasi kualitas dan kelestarian sumber daya mineral air, lahan dan energi yang dapat diperbaharukan.
4. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
- a. PENCEPATAN kualitas pembangunan kesehatan
 - b. Optimalisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.
 - c. Percepatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - d. Menumbuhkembangkan peran swasta dalam pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan Infrastruktur
- a. Percepatan pembangunan kawasan strategis
 - b. Percepatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan
 - c. Percepatan peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan.
 - d. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sentra ekonomi.
- (Sejarah singkat & Profil Kabupaten Kampar 2012 : 10-15)

C. LAMBANG

Gambar: I.2 (*Lambang Kabupaten Kampar*)



Sumber : www.KamparKab.co.id

Lambang Kabupaten Kampar terbagi atas sembilan bagian, yaitu :

1. Empat petak dalam perisai
2. Tiga garis putih di tengah
3. Bintang lima dengan dua tangkai padi
4. Rusa
5. Menara sumur
6. Dua buah gerobak lori
7. Empat pucak benteng
8. Pohon karet
9. Peta kabupaten Kampar

Adapun arti lambang tersebut adalah :

- a. Benteng dan perisai melambangkan kekuatan dan kekebalan rakyat dalam berjuang dan membangun
- b. Batu bersusun melambangkan Persatuan Nasional yang kuat, kokoh serta menimbulkan inspirasi membangun
- c. Tujuh belas buah batu bersusun menunjukkan tanggal tujuh belas hari proklamasi

- d. Delapan buah batu bata menunjukkan bulan delapan (bulan Agustus)
- e. Empat dan lima dibawah menunjukkan tahun 45 (1945)
- f. Satu pintu gerbang melambangkan pintu kemakmuran
- g. Bintang bersudut lima melambangkan Pancasila
- h. Pohon karet melambangkan sumber dari kemakmuran rakyat

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan sebagai pedoman yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan agar terdapat kesatuan aturan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi. Strategi terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dijalankan selama 5 Tahun kedepan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran. Strategi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mencapai lima tujuan tahun kedepan, dan sasaran tahunannya akan dijabarkan dalam 11 Bidang kewenangan Daerah sesuai UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Strategi umum yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah pemanfaatan seluruh sumber daya daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Kampar sebagai Negeri agamis yang berbudaya, berdaya dan sejahtera tahun 2025.

Sedangkan arah kebijakan adalah sendi atau azas dari kebijakan yang akan dijalankan selama periode waktu 2012-2016. Arah kebijakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Program Pembangunan Daerah untuk 2012-2016 adalah berlandaskan azas Kampar yang madani, azas berakhlak, azas kehidupan yang sehat, sejahtera, serta berdaya saing pada tahun 2016.

Untuk mendorong upaya peningkatan kualitas pemerintah daerah, maka arah kebijakan pembangunan daerah yang dijalankan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kampar adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan yang menuju ke arah Clean Government dan good governance sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan global.
- b. Memantapkan sistem kelembagaan, organisasi dan tata laksana pemerintahan pada segala jenjang pemerintahan agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya aparatur.
- d. Memantapkan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah agar efektif, efisien, akuntabel.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan manajemen pengawasan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi dan bersinergi dengan sistem pengawasan internal dan eksternal secara fungsional.
- f. Meningkatkan upaya penertiban dan mutu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar lebih efisien, efektif, profesional, beribawa dan bersih dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
- g. Mempertegas tata batas wilayah administrasi pemerintahan antar Provinsi, kepastian hukum atas wilayah administrasi pemerintahan dan mengefektifkan pengelolaan sumberdaya.

- h. Meningkatkan mutu sumberdaya aparatur pemerintah agar mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara lebih profesional, penuh dedikasi, loyalitas, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berlaku (www.kamparkab.co.id).

E. PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan arah kebijakan yang telah disusun, program-program pembangunan daerah yang dijalankan adalah:

- a. Program pelayanan daerah administrasi perkantoran.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur.
- d. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
- e. Program peningkatan pengembangan dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- f. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
- g. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- h. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepada kepala daerah /wakil kepala daerah.
- i. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- j. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota
- k. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa.

- l. Program peningkatan sistem pengawan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- m. Program pendidikan kedinasan
- n. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- o. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

F. VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN HUMAS PEMDA KAMPAR

1. Visi

Untuk menentukan arah dan kebijakan pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, maka ditetapkan visi yang berdasarkan isu pokok Bagian Hubungan Masyarakat sebagai berikut : **“Terdepan dalam bidang informasi dan komunikasi untuk terwujudnya masyarakat yang madani pada tahun 2016”**.

2. Misi

Untuk mendukung visi yang telah ditetapkan maka ditetapkan pula misi Bagian Hubungan Masyarakat yaitu :

- a. Menata dan mengembangkan informasi yang akurat, faktual, cepat dan profesional

- b. Membangun dan membina koordinasi dan hubungan antara personil dan institusi dalam rangka sinkronisasi sinergisitasi informasi
- c. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme staf bagian humas dalam penguasaan teknologi informasi dan membangun jaringan kerja dengan media massa
- d. Menyiapkan perangkat lunak dan keras media informasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang optimal

3. Kebijakan

Adapun kebijakan yang akan diambil dalam menunjang visi dan misi Bagian Humas ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan mekanisme dan alur pengumpulan, pengolahan informasi dan penyebaran informasi pada jajaran SKPD
- b. Meningkatkan kemampuan staf humas dalam rangka penyebarluasan informasi kebijakan pemerintahan daerah secara berkala
- c. Menciptakan dan memelihara iklim kerja yang setara dan saling membutuhkan antara Pemerintah dan media massa
- d. Memotivasi media cetak dan elektronik untuk perkembangan menuju media yang profesional (Renstra Humas Pemda Kampar 2012-2016 : 22)

4. Agenda Program Humas Pemda Kampar

Agenda program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Membangun sistem pengelolaan informasi berama SKPD sesuai dengan fungsi masing-masing dengan membentuk Bakohumas Daerah Kabupaten Kampar
- b. Pengembangan Staf dilingkungan kerja melalui jalur pendidikan formal dan diklat
- c. Peningkatan mekanisme kerja dan koordinasi baik internal maupun eksternal
- d. Peningkatan disiplin dan etos kerja
- e. Membangun stasiun Kampar Tv, sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Kampar sesuai dengan julukan “Kampar sebagai Serambi Mekahnya Riau”
- f. Menyebarluaskan informasi melalui koran masuk desa

Sedangkan program humas Pemda Kampar yang berkaitan dengan media relations adalah :

- a. Menyebarluaskan informasi pembangunan dan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat melalui forum kehumasan dan *coffee morning*
- b. Menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan industri media masa, dengan program koran masuk desa (Renstra Humas Pemda Kampar 2012-2016 : 23)

G. STRUKTUR DAN FUNGSI HUMAS PEMDA KAMPAR

Sekretariat Daerah merupakan unsur Pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh seseorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah, administrassi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten.

Bagian Humas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat guna memperjelas kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Eksistensi humas pada era saat ini merupakan peran yang penting dalam mensukseskan pembangunan bangsa ke depan. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan tata Pemerintahan adalah dapat menginformasikan (tersosialisasikan) berbagai kebijakan (*policy*) dan produk-produk regulasi Pemerintahan dengan profesional dan baik. Dengan demikian pelaksanaan kehumasan dilingkungan Pemerintahan akan terwujud secara optimal. Hal itu akan membawa dampak terhadap legitimasi Pemerintah sebagai penyenggara pelayanan public menjadi semakin tinggi, sejalan dengan semakin responsifnya dukungan masyarakat terhadap masyarakat terhadap kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu informasi merupakan hak setiap individu, maka pemerintah akan semakin menjadi terbuka guna memenuhi dan menjamin hak-hak publik terhadap informasi tersebut.

Beberapa hak publik tersebut antara lain :

1. Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (*right to observe*)
2. Hak untuk memperoleh informasi (*right Information*)
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi, pelopor dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran (*right to participate*)
4. Hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik
5. Hak untuk berekspresi (*freedom of expression*)
6. Hak untuk memajukan keberatan terhadap penolakan atau dijaminnya kelima hak tersebut (*right to appeal*).

Untuk mewujudkan dan menjamin hak-hak publik tersebut maka, perlu adanya jaminan akses informasi publik agar dapat menjawab tantangan kedepan dalam pengelolaan informasi publik tersebut. Oleh karena itu, era informasi dan globalisasi dibutuhkan kecepatan informasi yang akurat secara profesional, serta masyarakat yang menjadi sangat heterogen dan sarat dengan berbagai kepentingan, maka tugas kehumasan dalam pelayanan informasi Pemerintah kedepan relatif cukup berat. Perlu ditangani SDM yang profesional.

Mengingat arti pentingnya peran dan fungsi humas sebagai pusat penyebarluasan informasi, keterbukaan dan Otonomi Daerah ini, sangat perlu menyamakan visi dan misi serta persepsi tentang kehumasan, baik ditingkat pusat maupun di Daerah, terutama dalam mengelola ruang koordinasi bagi penyelenggaraan tugas-tugas humas.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 6 tahun 2008, struktur organisasi dan tata kerja perangkat Daerah padabagian humas terdiri dari

1. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi
2. Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi
3. Sub Bagian Hubungan Pers dan Media

Berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata pelaksanaan, bahwa bagian hubungan masyarakat Kabupaten Kampar berkedudukan dibawah Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, dimana bagian humas dipimpin oleh kepala bagian yang memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program penyebarluasan informasi pembangunan.

Sesuai dengan peraturan Bupati Kampar nomor : 34 tahun 2008, kepala bagian humas mempunyai tugas :

1. Memberikan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan
2. Mendisposisikan surat kepada bawahan
3. Memberikan tugas dan petunjuk tentang tugas kepada bawahan
4. Membuat *release* dan memberikan keterangan pers kepada seluruh wartawan tentang kegiatan Pemerintah Kabupaten Kampar
5. Melakukan koordinasi dengan seluruh satker dan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memberikan informasi

7. Mengkoordinasikan penyusunan pidato Bupati dan mengkoordinir pembuatan Notulen rapat Bupati Kampar, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
8. Melaksanakan pengolahan Administrasi Hubungan Masyarakat
9. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hukum, pemberitaan dan menyiapkan bahan petunjuk dan pemecahan masalah
10. Menyiapkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberitaan kegiatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data menjadi informasi
12. Memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah
13. Menginventarisasi produk peraturan Daerah Kabupaten Kampar
14. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pemberitaan
15. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
16. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai penilaian DP-3
17. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi mempunyai tugas mengkoordinir penyelenggaraan tugas dan program pengolahan dan pengumpulan informasi. Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas
4. Mencari, mengumpulkan dan mempelajari perundang-undangan yang berkaitan dengan pengolahan informasi
5. Mengumpulkan dan mengolah informasi tentang kegiatan-kegiatan Pemerintah dan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
6. Mengolah data tentang kegiatan Pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Kampar menjadi informasi
7. Menyusun dan merencanakan kegiatan tentang informasi kegiatan-kegiatan Pemerintah dan masyarakat
8. Mempersiapkan informasi yang akan disampaikan kepada publik tentang kegiatan-kegiatan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kampar
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
10. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian DP-3
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

Kepala Sub Bagian Hubungan media dan Pers mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan program mengkoordinir hubungan media dan pers, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas
4. Menyiapkan bahan-bahan kebijaksanaan dibidang Pemerintahan
5. Menyiapkan pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah melalui media cetak maupun elektronik
6. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan pemberitaan Buletin sebagai media intern
7. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyelenggarakan keterangan atau konferensi pers
8. Mempersiapkan pelaksanaan jumpa pers Pimpinan Pemerintah Daerah
9. Memelihara instrumen-instrumen yang berhubungan dengan kegiatan kehumasan
10. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
11. Menilai hasil tugas bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3
12. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan

Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas mengkoordinir kegiatan Publikasi dan Dokumentasi, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas
4. Mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengolahan informasi
5. Menyusun dan menyimpan Dokumentasi kegiatan kegiatan pemerintah daerah
6. Mengatur dan mengawasi penyebarluasan pembinaan Dokumentasi
7. Menyusun dan merencanakan kegiatan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemerintah Daerah
8. Mempersiapkan bahan-bahan dan mengkonsepkan pidato Bupati Kampar serta membuat notulen rapat yang dihadiri Bupati Kampar, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
9. Menyusun dan mendokumentasikan naskah-naskah Bupati
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
11. Menilai hasil tugas bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3

12. Melaksanakan tugas lain yang di Perintahkan oleh atasan (Renstra
Humas Pemda Kampar 2012-2016 : 12-18)

Tabel 2.1

No	NAMA	Pendidikan	Masa kerja	Jabatan
1.	Hamdani	S I	12 Tahun	Kepala bidang humas
2.	Dedi Irawan	S I		Kesubag hubungan media dan pers
3.	Syafrizal Hasan	S I	8 Tahun	Kasubag Dokumentasi dan Publikasi
4.	Jon Afrizal	S I	10 Tahun	Kasubag Pengumpulan dan Pengolahan Informasi
5.	Pertini Lindawati	S I	6 Tahun	Staf Bagian Humas
6.	Mazna Iz	S I	7 Tahun	Staf Bagian Humas
7.	Rini Fauziah	S I	6 Tahun	Staf Bagian Humas
8.	Metri Yanti	S I	4 Tahun	Staf Bagian Humas
9.	Sri Ramadhani	SLTA	7 Tahun	Staf Bagian Humas
10.	Arnida Yanti	S I	3 Tahun	Staf Bagian Humas
11.	Syafril Azmi	S I	5 Tahun	Staf Bagian Humas
12.	Tien Soharti	SLTA	8 Tahun	Staf Bagian Humas
13.	Supardi	D 3	7 Tahun	Staf Bagian Humas

14.	Erlinda	S I	9 Tahun	Staf Bagian Humas
15.	Arhasnida	S I	8 Tahun	Staf Bagian Humas
16.	TS. Nasrullah	S 2	10 Tahun	Staf Bagian Humas
17.	Imelda Dewi SW	S I	5 Tahun	Staf Bagian Humas
18.	Adi Pradana	SLTA	6 Tahun	Staf Bagian Humas
19.	Prima Lady Vita	SLTA	8 Tahun	Staf Bagian Humas
20.	Iskandar	SLTA	9 Tahun	Staf Bagian Humas
21.	M.Yulizar	S I	3 Tahun	Staf Bagian Humas
22.	Kamal Farhan	S I	10 Tahun	Staf Bagian Humas
23.	Wirda Ningsih	D 3	4 Tahun	Staf Bagian Humas
24.	Muzakat	S I	4 Tahun	Staf Bagian Humas
25.	Juni Mayanti	S I	5 Tahun	Staf Bagian Humas
26.	Asra Mardeni	SLTA	2 Tahun	Staf Bagian Humas
27.	Andi Karman	SLTA	3 Tahun	Staf Bagian Humas
28.	Mashari	SLTA	2 Tahun	Staf Bagian Humas
29.	Desi Arsandi			Staf Bagian Humas
30.	Andika	D 3	4 Tahun	Staf Bagian Humas
31.	Veivi Meita S	D 3	5 Tahun	Staf Bagian Humas
32.	Wan Novita Sari	S I	4 Tahun	Staf Bagian Humas
33.	Kasmiran	SLTA	5 Tahun	Staf Bagian Humas
34.	Dino Herman	D 3	3 Tahun	Staf Bagian Humas

Sumber : rencana strategis Bagian Humas Kampar tahun 2012-2016